

**TESIS**

**Konflik pada Pembangunan Pabrik Semen (PT. Conch Cement  
Indonesia) di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru**

Disusun dan diajukan Oleh :

**Pratiwi Quenta Maharani**

**E052 18 1 002**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**KONFLIK PADA PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN (PT. CONCH CEMENT INDONESIA) DI KAB. BARRU, KEC. BARRU**

Disusun dan diajukan oleh  
**PRATIWI QUENTA MAHARANI**  
E052181002

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada tanggal **25 AGUSTUS 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,



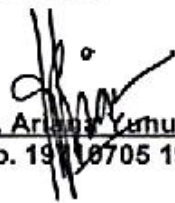
**Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.**  
Nip. 19710917 199703 1 001

Pembimbing Pendamping,



**Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.**  
Nip. 19750818 200801 1 008

Ketua Program Studi  
Ilmu Politik,



**Dr. Arif Nugroho Yanus, S.IP., M.Si.**  
Nip. 19710705 199803 2 002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



**Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.**  
Nip. 19750818 200801 1 008

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pratiwi Quenta Maharani

Nomor pokok : E52181002

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 25 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Pratiwi Quenta Maharani

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirahim,**

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang masih memberikan kesempatan, ketabahan, kesehatan, dan kelancaran selama proses pengerjaan dan penyelesaian tesis ini, dengan judul **“Konflik pada Pembangunan Pabrik Semen (PT. Conch Cement Indonesia) di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru”**. Selanjutnya, salam dan rahmat kepada Nabiullah Muhammad SAW, yang menunjukkan jalan kebenaran dan membimbing umat manusia dari jaman jahiliyah hingga manusia memperoleh hidayah. Adapun skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan sebagai kewajiban untuk mendapatkan gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian dan penulisan tesis ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Keluarga besar tercinta; Bapak Kaharudin Sardjono, Mama Fatmawati Bora, Kak Mellyawaty Eka Putri, Kak Prajuwita Puji Lestari, Kak Paramitha Endah Jalasunastri, adek Prabowo Arya Pradana, keponakan-keponakan yang lucu dan menggemaskan, serta seluruh keluarga besar yang selalu saya sayangi. Terimakasih atas segala bentuk dukungan, masukan dan dorongan semangat yang tidak pernah henti. Terimakasih atas segala do'a yang dipanjatkan dengan namaku tersemat didalamnya, terimakasih karena selalu menjadi “rumah”. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
2. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin Bapak **Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.si**,  
Kepada Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik, Ibu **Dr.  
Ariana Yunus, S.IP, M.Si**.

3. Kepada Bapak **Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si**, dan juga Bapak **Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si** selaku dosen pembimbing. Terimakasih atas segala masukan, ilmu, pikiran, serta semangat yang diberikan selama masa perkuliahan dan dalam proses penyelesaian tesis ini. Saya percaya Allah telah mengatur segala sesuatunya sehingga melalui ilmu Bapak dosen tercinta berikan, tesis ini dapat selesai. Semoga semua ilmu dan bantuan yang diberikan senantiasa menjadi amal jariyah yang tidak pernah terputus.
4. Kepada Bapak **Prof. Dr. Armin, M.Si** selaku penguji I, dan Ibu **Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP, M.Si**, selaku penguji II, serta Bapak **Dr. A. Lukman, S.IP, M.Si** selaku penguji III, dan juga kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah, terimakasih atas segala masukan dan arahan yang diberikan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda.
5. Teman-teman seperjuangan, mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu politik Angkatan 2018, Terimakasih teman-teman atas semua bantuan selama masa perkuliahan bersama, terimakasih atas kenangan dan pelajaran hidup Semua kenangan yang ada kalian didalamnya, tidak akan pernah hilang.
6. Kepada dosen-dosen Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mengajarkan banyak hal, memberikan ilmu, dan wawasan kepada penulis selama perkuliahan, semoga Allah senantiasa menghitungnya sebagai amal jariyah yang tidak akan pernah putus
7. Kepada teman-teman lain yang juga sudah banyak mendukung, menyemangati, menghibur, dan membantu selama proses

penyelesaian tesi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, semoga Allah SWT senantiasa menjaga kalian dalam naungan rahmat-Nya.

Akhir kata, penulis ingin menyampaikan bahwa tulisan ini tentu tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang diberikan akan sangat saya hargai dan menjadi cara untuk terus memperbaiki diri. Namun, terlepas dari kekurangan-kekurangannya saya berharap tulisan ini dapat menjadi tambahan dan referensi untuk menambah hasanah ilmu pengetahuan bagi pembaca sekalian. Terimakasih, Wassalamualaikum Warahamatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 25 Agustus 2022

**Pratiwi Quenta Maharani**

## ABSTRAK

PRATIWI QUENTA MAHARANI. **Konflik pada Pembangunan Pabrik Semen PT Conch Cement Indonesia di Kecamatan Barru Kabupaten Barru** (dibimbing oleh Muhammad, dan Sukri).

Penelitian ini bertujuan mengetahui dinamika konflik yang terjadi antara korporasi dengan pemerintah dan masyarakat pada pembangunan pabrik semen PT Conch Cement Indonesia di Kabupaten Barru. Jenis penelitian berupa pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Teori yang digunakan adalah teori konflik Ralf Dahrendorf. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi. Data dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Kami menemukan, konflik disebabkan oleh penerbitan izin lingkungan oleh Bupati Barru yang menjabat saat itu dengan Nomor: 306/KLH/VII/2016 Tahun 2016 dinilai melanggar asas pemerintahan yang baik. Masyarakat merespon pembangunan pabrik semen PT Conch yang dinilai tidak memenuhi standar perizinan, tetapi proses pembangunan masih terus dilanjutkan. Akibatnya, masyarakat melakukan konfrontasi yang berpuncak pada keputusan masyarakat memasukkan gugatan ke PTUN Makassar. Proses sidang berjalan selama kurang lebih dua tahun, sampai pada proses pengajuan kembali (PK) oleh pihak PT Conch kepada Mahkamah Agung setelah sebelumnya kalah pada tahap kasasi, Kami menemukan, hasil dari PK tersebut menyatakan penolakan pengadilan untuk peninjauan kembali karena keputusan sebelumnya dinilai tidak terdapat cacat hukum di dalamnya serta tidak terdapat kekhilafan yang nyata. Keputusan Bupati Barru mengenai pembangunan industri semen dinyatakan tidak berlaku lagi dan mewajibkan perusahaan untuk menghentikan segala bentuk aktivitas pembangunan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa walaupun resolusi konflik menciptakan redistribusi kekuasaan, dalam konflik ini keteraturan sosial atau *social order* di tengah masyarakat tidak berhasil terbentuk karena memungkinkan konflik dalam bentuk yang lain terjadi. Kasus ini pada akhirnya tidak dapat menjelaskan *social order* sebagai resolusi konflik sebagaimana pendapat Dahrendorf.

Kata kunci: konflik, pembangunan, konstruksi pabrik semen



## ABSTRACT

**PRATIWI QUENTA MAHARANI.** *Conflict in The Construction of A Cement Factory (PT. Conch Cement Indonesia) in Barru District, Barru Regency* (Supervised by **Muhammad** and **Sukri**)

This study aims to determine the dynamics of the conflict that occurs between corporations and the government and the community in the construction of a cement factory PT. Conch Cement Indonesia in Barru Regency. The type of research used is qualitative research, with case study research methods. The theory used is Ralf Dahrendorf's conflict theory. Primary data were collected through interviews, while secondary data used documentary techniques. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that the conflict is caused by issuance of an environmental permit by the Barru Regent who serves at the time, Number: 306/KLH/VII/2016 which is considered to violate the principles of good governance. Responding to the construction of a cement factory PT Conch, which is considered not to meet the licensing standards, but the development process is still continuing, the community finally has a confrontation that culminates in the community's decision to submit a lawsuit to the Makassar Administration Court. The trial process then continues for approximately 2 years, until the Re-Submission (RS) process by PT. Conch to the Supreme Court after previously losing at the Cassation stage. The results of the RS states the court's refusal for a review because the previous decision is judged to have no legal defects in it and there are no real mistakes. Thus, the decision of the Regent of Barru regarding the construction of the cement industry is declared no longer valid, and requires the company to stop all forms of development activities. Thus it can be said that although conflict resolution creates a redistribution of power, in this conflict social order or social order in society is not successful because it allows conflict in other forms to occur. In the end, this case cannot explain social order as conflict resolution as Danhrendorf argues

Keywords: conflict, construction, cement factory construction





## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
BAB I .....	12
PENDAHULAUN.....	12
1.1 Latar Belakang .....	12
1.2 Rumusan Masalah .....	18
1.3 Tujuan Penelitian .....	19
1.4 Manfaat Penelitian .....	19
BAB II .....	21
TINJAUAN PUSTAKA .....	21
2.1 Teori Konflik.....	21
2.1.1 Definisi Konflik.....	21
2.1.2 Teori Konflik menurut Ralf Dahrendorf.....	30
2.1.3 Dinamika Konflik .....	37
2.2 Penelitian Terdahulu.....	40
2.3 Kerangka Pemikiran.....	44
BAB III .....	47
METODELOGI PENELITIAN .....	47
3.1 Pendekatan dan Metode penelitian .....	47
3.2 Lokasi Penelitian .....	49
3.3 Teknik pengumpulan data .....	50
3.4 Teknik Analisis Data .....	53
BAB IV.....	56

<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
<b>4.1 Gambaran Kabupaten Barru .....</b>	<b>56</b>
<b>4.2. Gambaran Umum Kawasan Pembangunan Industri Semen di Kab.     Barru.....</b>	<b>64</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>68</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>68</b>
<b>5.1 Proses Konflik Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Barru .....</b>	<b>68</b>
<b>5.1.1 Pembangunan pabrik semen di Kecamatan Barru.....</b>	<b>69</b>
<b>5.1.2 Konflik terbuka antara masyarakat dengan pemerintah dan         PT.Conch.....</b>	<b>82</b>
<b>5.1.3 Krisis atau puncak konflik antara masyarakat dengan pemerintah         dan PT.Conch.....</b>	<b>84</b>
<b>5.2 Implikasi Teori .....</b>	<b>102</b>
<b>BAB VI.....</b>	<b>109</b>
<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>109</b>
<b>6.1 Kesimpulan .....</b>	<b>109</b>
<b>6.2 Saran.....</b>	<b>112</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>117</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pembagian wilayah dan luas setiap Kecamatan.....	50
Table 2. Jumlah Desa dan Kelurahan.....	51
Table 3. Luas Desan dan Kelurahan di Kecamtana Barru.....	52
Table 4. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin setiap Kecamatan.....	53
Table 5. Pihak-pihak yang terkait dalam rencana pembangunan pabrik semen PT. Conch di Kabupaten Barru.....	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta wilayah Kabupaten Barru.....	49
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULAUN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan dalam sector apapun tidak akan pernah terlepas dari konflik. Hal ini terjadi karena pembangunan mengharuskan ketersediaan lahan, sementara lahan di Indonesia sebagian besar merupakan lahan pertanian, perkebunan, ataupun empang. Sehingga, dapat dikatakan bahwa konflik dalam pengelolaan sumber daya alam, dalam hal ini agrarian atau tanah, akan selalu ada karena terlalu banyak pihak yang berkepentingan dengan kebutuhan dan tujuan yang berbeda.<sup>1</sup> Terlebih di daerah, dimana pemanfaatan lahan selama ini lebih banyak berpusat pada pemanfaatan agrarian, sehingga pengalih fungsian lahan kearah industrial menjadi tumpang tindih dengan visi misi pemerintah untuk menciptakan kemajuan daerah.

Berkembangnya suatu daerah yang salah satunya ditandai dengan pesatnya perkembangan pembangunan. Pembangunan tersebut dapat berupa pembangunan fisik, seperti infrastruktur ataupun sarana prasarana, dan juga non fisik seperti pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia. Pembangunan merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah, sehingga dapat

---

<sup>1</sup> Mei Pritangguh, Ichsan Malik, Beni Rudiawan, 2019, *Resolusi Konflik Agraria dalam Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo*, Jurnal Damai dan Resolusi konflik, Vol5(1)

dikatakan bahwa pembangunan dan kebijakan merupakan dua mata uang yang tidak terpisahkan, dimana keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Aspek-aspek sosial dan lingkungan kemudian menjadi kerangka dasar dan prioritas pembangunan sebagai tujuan secara umum. Dengan demikian, kebijakan terkait pembangunan harus memperhatikan konsep-konsep yang sesuai dengan pembangunan yang ideal, yaitu pembangunan yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memperhatikan berbagai dimensi secara seimbang dan proporsional.<sup>2</sup>

Selanjutnya, untuk mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan, maka pertimbangan akan pemanfaatan sumber daya alam harus diperhatikan. Menurut komisi Bruntland, pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan persediaan sumber daya alam untuk generasi akan datang.<sup>3</sup> Konsep mengenai pembangunan berkelanjutan ini juga tertuang dalam dokumen Agenda 21 Indonesia yang dihasilkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*Earth Summit*) di Riode Jeneiro tahun 1992, yang meresmikan mengenai strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan yang dibagi kedalam empat kategori, yaitu:

---

<sup>2</sup> Iwan Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004, *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*, Jakarta : LP3ES, 3

<sup>3</sup> Bruce Mtchel B. Setiawan dan Dwita hadi Rahmi, 2010, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 32

(1) pelayanan masyarakat, (2) pengelolaan limbah, (3) pengelolaan sumber daya tanah, dan (4) pengelolaan sumber daya alam.<sup>4</sup>

*Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat telah diamanatkan dalam undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini berarti dalam pengeksploitasian sumber daya alam harus dikelola secara bijak, terencana, berdasarkan pelestarian lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan manusia, baik generasi sekarang maupun generasi akan datang.<sup>5</sup>*

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan berkelanjutan harus direncanakan untuk kepentingan jangka panjang dengan skala yang lebih luas, dan tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek.

Secara umum konflik atau perselisihan paham, sengketa diartikan dengan pendapat yang berlainan antara dua pihak mengenai masalah tertentu pada saat dan keadaan yang sama.<sup>6</sup> Konflik pembangunan pabrik semen di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru terjadi antara warga yang menolak pembangunan pabrik semen, dan pemerintah dengan pihak korporasi. Warga yang menolak menganggap pembangunan pabrik semen mengakibatkan kerusakan lingkungan dan mengurangi ketersediaan air. Akibat dari ketimpangan yang ada, maka pembangunan yang ada kemudian menimbulkan permasalahan baru dan konflik antara

---

<sup>4</sup> *Ibid*, 62-63

<sup>5</sup> Yonathan Pongtuluran, 2015, *Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2

<sup>6</sup> Thalib Hambali, 2009, *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan*, (Jakarta : Media Grafika), 25

masyarakat dengan pemerintah dan pihak korporasi. Konflik-konflik yang terjadi juga disebabkan oleh perbedaan interpretasi setiap pihak akan lahan, dimana lahan merupakan objek utama dari pembangunan itu sendiri.

Kabupaten Barru merupakan salah satu daerah yang sedang gencar melakukan pembangunan. Berbagai aspek pembangunan seperti misalnya pembangunan infrastruktur, perbaikan sarana prasarana, hingga industri dicanangkan pemerintah daerah dengan tujuan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah dan mensejahterakan masyarakat. Kabupaten Barru merupakan salah satu wilayah dengan potensi sumber daya alam berupa batu kapur yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku semen dan memiliki pelabuhan karena letak geografis yang strategis. Melihat potensi tersebut, PT. Conch Barru Cement Indonesia mulai melakukan eksploitasi, pembangunan pelabuhan, pabrik, dan *power house* di Kabupaten Barru, dimana perencanaan akan pendirian pabrik tersebut telah dimulai sejak tahun 2015.

Proses pembangunan sarana industri ini menimbulkan berbagai kontra dari banyak pihak, terutama warga desa yang berada di sekitar titik pembangunan pabrik semen. Masyarakat menganggap bahwa pembangunan pabrik semen dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, yang akan berdampak pada beberapa aspek seperti misalnya dari aspek ekonomi, pembangunan industri pabrik semen yang mengalih fungsikan lahan pertanian dapat penurunan hasil produksi pertanian serta hilangnya



sumber mata air di kawasan *karst*, sedangkan dari aspek lingkungan, pembangunan pabrik di sekitar kawasan pemukiman dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan polusi udara. Terlebih lagi warga menilai lokasi pembangunan pabrik yang berada di tengah kota, tepatnya di Jampue, Kelurahan Mangempang, bukan merupakan kawasan industri sehingga hal ini kemudian menjadi sebuah kontroversi.<sup>7</sup>

Berbagai tanggapan muncul merespon pembangunan pabrik semen PT. Conch yang dinilai tidak memenuhi standar perizinan, namun proses pembangunan masih terus dilanjutkan. Konflik terkait pembangunan ini kemudian tidak dapat dihindarkan. Pemerintah dan pihak korporasi menilai bahwa pembangunan pabrik semen dapat membuka lapangan pekerjaan, membuka peluang investasi ke daerah, serta meningkatkan pendapatan daerah, namun opini ini kemudian dibantah oleh masyarakat yang kontra yang menganggap bahawa 'janji' mengenai ketersediaan lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan berbagai kerugian yang didapatkan. Pengalih fungsian lahan pertanian menjadi pabrik lebih banyak memunculkan kerugian di banding keuntungan bagi masyarakat, hal ini dikarenakan perbedaan interpretasi akan lahan bagi setiap pihak.

Berbagai protes yang timbul hingga tahap proses hukum, menunjukkan bahwa pembangunan pabrik semen oleh PT. Conch sejak awal sudah bermasalah. Protes tersebut tidak datang tanpa alasan,

---

<sup>7</sup> *Tolak Conch Cement 'Selamatkan Barru'*, JurnalNews.Net, 13 Februari 2020, diakses dalam <https://jurnalnews.net/2020/02/13/tolak-conch-cement-selamatkan-barru/>

dimana masyarakat menganggap bahwa pemabngunan pabrik semen ini dinilai belum mendapatkan beberapa syarat pemabngunan, namun dalam realisasinya tetap dilakukan. Selain itu, fakta bahwa PT. Conch Barru Cement yang awalnya ingin melakukan pembangunan di Kabupaten Maros namun kemudian ditolak karena permasalahan syarat pembangunan, juga menjadi pemicu masyarakat mempertanyakan kebijakan pemerintah daerah yang membuat PT. Conch 'berani' melakukan pembangunan.

Menjadi menarik untuk melihat dinamika yang terjadi terkait kebijakan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Barru ini. Perbedaan interpretasi dan persepsi membawa masyarakat dengan pihak korporasi dan pemerintah kepada konflik mengenai pembangunan yang terjadi, sehingga menarik untuk melihat bagaimana bentuk serta proses konflik yang terjadi.

Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi penulis mengambil tema ini. Pertama, konflik ini menyajikan kontradiksi kepentingan antara negara, korporasi, dan masyarakat. Pemanfaatan kekayaan di Indonesia kerap kali memunculkan gesekan-gesekan dengan masyarakat. Kedua, konflik ini melibatkan banyak aktor yang bermain, yakni masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta yang masing-masing memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda. Ketiga, konflik ini dapat dijadikan kaca mata bagi konflik-konflik pembangunan yang serupa di Indonesia dimana suara masyarakat Kab.Barru membawa konflik

pembangunan pabrik semen PT. Conch ke ranah hukum hingga proses pembangunan ditunda untuk sementara, dengan kata lain, usaha masyarakat cukup besar dan terorganisir sehingga dapat mencapai tahap ini. Keempat, melalui masalah ini kita dapat belajar tentang bagaimana konflik ditengah masyarakat kita terjadi sebagai dorongan adanya perubahan tatanan sosial di masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin melakukan penelitian tentang dinamika konflik kebijakan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Barru. Adapun judul penelitian secara lengkap adalah “Konflik Pembangunan: Studi Kasus pada Pembangunan Pabrik Semen (PT. Conch) di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Amanat undnag-undang 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 tentang otonomi daerah, menjadikan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri terkait pengelolaan daerah, termasuk didalamnya pemanfaaaant sumber daya daerah dan pembangunan. Setiap pembangunan yang dilakukan tentunya harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum kebijakan terkait pembangunan itu dilakukan, utamanya aspek kesejahteraan masyarakat. Pembangunan industri pabrik semen di tengah kota Kabupaten Barru menimbulkan berbagai protes dari masyarakat karena alasan lingkungan, ekonomi, pengalih fungsian lahan, serta syarat pembangunan yang dinilai

tidak sesuai standar aturan pemerintah daerah, namun pihak PT. Conch tetap melakukan pembangunan tersebut yang dimulai sejak tahun 2017 hingga saat ini. Menarik untuk melihat bagaimana kebijakan politik pembangunan pemerintah daerah terkait hal ini.

Berdasarkan uraian masalah dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan focus permasalahan, yaitu :

Bagaimana proses konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah dan PT.Conch pada pembangunan pabrik semen di Kabupaten Barru ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

a. Untuk menjelaskan proses konflik pembangunan pabrik semen PT. Conch di Kabupaten Barru,

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis penelitian ini yakni sebagai berikut

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis pada pengembangan akademik dalam bidang ilmu politik khususnya di bidang kebijakan dan politik pembangunan

2. Sebagai sumbangan pada kajian kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Barru terkait politik pembangunan

3. Untuk kepentingan wilayah akademis, hasil penelitian ini akan memperkaya khasanah ilmu politik dan perkembangan keilmuannya, terutama terhadap tema-tema kebijakan dan politik pembangunan

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai konflik kebijakan dan politik pembangunan yang muncul sebagai dampak adanya pembangunan di daerah.

2. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam melihat konflik yang terjadi dalam sebuah proses pembangunan serta kajian dalam pembuatan kebijakan selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini dijelaskan mengenai beberapa konsep atau teori yang dijadikan dasar terkait masalah penelitian yaitu mengenai teori konflik. Konsep atau teori diharapkan dapat menganalisis dan menginterpretasi masalah dan data yang diangkat dalam penelitian ini.

#### **2.1 Teori Konflik**

##### **2.1.1 Definisi Konflik**

Konflik merupakan hal yang akan sering terjadi dalam kehidupan, selama manusia masih hidup dan berinteraksi dan bersosial. Konflik akan mungkin terjadi dalam hubungan antar dua orang atau kelompok jika terdapat perbedaan dan gesekan kepentingan antara satu pihak dengan pihak lainnya, dimana dalam kehidupan bermasyarakat hal ini tidak akan mungkin dapat dihindari.<sup>8</sup>

Terdapat beberapa definisi konflik secara bahasa maupun istilah. Menurut istilah, konflik berasal dari kata kerja bahasa Latin *configure* yang berarti saling memukul. Kata “konflik” menurut kamus ilmiah populer adalah pertentangan, pertikaian, persengketaan, dan perselisihan (Partanto dan Al Barry, 1994:354). Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia konflik diartikan dengan pertentangan, percekocokkan (Poerwadarminta, 1982:518). Konflik berarti adanya oposisi atau

---

<sup>8</sup> Agus M. Hardjana, 1994, *Konflik di Tempat Kerja*, (Yogyakarta : Kanisius), 9

pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut pengertian hukum, konflik berarti perselisihan paham, perbedaan pendapat, atau sengketa antara dua pihak tentang suatu perkara yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pada keadaan yang sama. Secara umum konflik merupakan perbedaan interpretasi akan suatu hal dalam keadaan yang sama namun dinilai atau dipahami secara berbeda oleh masing-masing pihak.<sup>10</sup>

Sementara itu, Webster dalam Muryanti (2013:7-8) mendefinisikan konflik sebagai perbedaan persepsi mengenai suatu kepentingan atau pihak-pihak yang berkonflik memiliki aspirasi masing-masing, dimana aspirasi ini kemudian tidak dapat diterjemahkan secara imbang dan simultan. Sehingga berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa konflik mengandung arti benturan, yang dapat diartikan sebagai perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dan kelompok dengan pemerintah. Benturan tersebut mengakibatkan kedua belah pihak yang terlibat konflik mengalami hambatan dalam proses pencapaian tujuan.

- Faktor penyebab konflik

---

<sup>9</sup> Winardi, 1994, *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, (Bandung :Mandar Maju), 1

<sup>10</sup> Muchsan, 1942 dalam Thalib Hambali, 2009, *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan*, (Jakarta : Media Grafika), 25

Terjadinya konflik disebabkan oleh berbagai faktor. Berbagai faktor tersebut dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu : 1. Triggers (pemicu): peristiwa yang memicu sebuah konflik namun tidak diperlukan dan tidak cukup memadai untuk menjelaskan konflik itu sendiri. 2. Pivotal factors or root causes (faktor inti atau penyebab dasar): terletak pada akar konflik yang perlu ditangani supaya pada akhirnya dapat mengatasi konflik. 3. Mobilizing factors (faktor yang memobilisasi): masalah-masalah yang memobilisasi kelompok untuk melakukan tindakan kekerasan. 4. Aggravating factors (faktor yang memperburuk): faktor yang memberikan tambahan pada mobilizing factors dan pivotal factors, namun tidak cukup untuk dapat menimbulkan konflik itu sendiri.<sup>11</sup>

Berbeda dengan pendapat Klem yang dikutip oleh M. Mukhsin Jamil, Wirawan menyatakan bahwa konflik dapat terjadi secara alami karena adanya kondisi objektif yang dapat menimbulkan konflik. Kondisi objektif tersebut antara lain :<sup>12</sup> 1.Keterbatasan sumber, yaitu kondisi dimana manusia mengalami keterbatasan sumber-sumber sehingga terjadi kompetisi untuk mendapatkan sumber yang diperlukan dan sering kali menimbulkan konflik. 2.Tujuan yang berbeda, seperti yang dikemukakan oleh Hocker dan Wilmot (1978) konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik mempunyai tujuan yang berbeda, atau bisa juga terjadi karena pihak yang terlibat konflik memiliki tujuan yang sama tetapi

---

<sup>11</sup>Klem, 2007, dalam M. Mukhsin Jamil, 2007, *Mengelola Konflik Membangun Damai : Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*, (Semarang : Walisongo Mediation Centers), 16

<sup>12</sup> Wirawan, 2013, *Konflik dan Manajemen Konflik : Teori, Aplikasi dan Penelitian*, (Jakarta : Salemba Humanika)



cara untuk mencapainya berbeda. 3.Saling tergantung atau interdependensi tugas, yaitu konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik memiliki tugas yang tergantung satu sama lain. 4.Diferensiasi organisasi, yaitu konflik dalam organisasi yang disebabkan karena pembagian tugas dalam birokrasi organisasi dan spesialisasi tenaga kerja pelaksanaannya. 5.Ambiguitas yuridiksi, yaitu pembagian tugas yang tidak definitif sehingga menimbulkan ketidakjelasan cakupan tugas dan wewenang unit kerja dalam organisasi. 6.Sistem imbalan yang tidak layak, yaitu konflik yang terjadi di lingkungan perusahaan dimana manajemen perusahaan menggunakan sistem imbalan yang dianggap tidak adil atau tidak layak oleh karyawan.

Kemudian faktor selanjutnya, komunikasi yang tidak baik, beberapa faktor komunikasi yang dapat menyebabkan konflik antara lain : distorsi, ketersediaan informasi yang tidak bebas, dan penggunaan bahasa yang tidak dimengerti oleh pihak-pihak lain dalam berkomunikasi. 8.Konflik juga terjadi karena perlakuan yang tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia, dan melanggar hukum. 9.Beragam karakteristik sistem sosial, yaitu konflik yang disebabkan karena karakteristik sistem sosial yang berbeda, seperti suku, agama, dan ideologi. 10. Pribadi orang, konflik yang disebabkan karena sifat-sifat seseorang atau sekelompok orang yang dapat memicu timbulnya konflik, seperti selalu curiga dan berpikiran negatif terhadap orang lain, sombong, egois, merasa selalu benar, kurang dapat mengendalikan emosi, dan ingin menang sendiri. 11.Kebutuhan,

yaitu kebutuhan manusia yang berbeda atau kebutuhan yang sama tetapi terbatas jumlahnya, sehingga apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dapat memicu terjadinya konflik. 12. Perasaan dan emosi, perasaan dan emosi yang tidak rasional saat berinteraksi dengan orang lain dapat menimbulkan konflik serta menentukan perilaku seseorang saat terlibat konflik. 13. Pola pikir sebagian manusia Indonesia yang tidak mandiri, yaitu konflik yang disebabkan karena kondisi negara yang sedang mengalami krisis keuangan dan diikuti demonstrasi, pemogokan, perusakan oleh sejumlah warga karena tingginya harga bahan kebutuhan pokok. 14. Budaya konflik dan kekerasan, yaitu kondisi sosial budaya yang melatar belakangi konflik dalam suatu negara, seperti primordialisme, memudarnya rasa nasionalisme, kehidupan politik dan ekonomi liberal, terkikisnya nilai-nilai tradisi, serta politisasi agama.

Konflik merupakan suatu pembahasan yang telah ada sejak dahulu, dengan demikian pengertian mengenai konflik telah dijelaskan oleh beberapa pemikir terdahulu. Pada awalnya menurut paham positivisme dalam ilmu sosiologi, perubahan dan perbedaan dipandang sebagai hal yang biasa terjadi dan bukan merupakan suatu hambatan yang berarti dalam kehidupan masyarakat, dimana paham ini memandang perkembangan dan perubahan sosial sebagai suatu hal yang statis dan linear. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan zaman, paham ini kemudian tidak sesuai dengan kondisi masyarakat karena hanya melihat fenomena berdasarkan fakta-fakta ilmiah dan data empiris tanpa

memperhitungkan kondisi sosial yang dinamis. Teori konflik kemudian muncul sebagai kritik terhadap paham positivisme tersebut. Beberapa tokoh yang kemudian mempelopori awal kemunculan teori konflik diantaranya adalah Karl Marx, Max Weber, dan George Simmel.

Teori konflik menurut Marx merupakan penekanan dari teori konflik secara eksplisit dalam skema Hegel yang dikembangkan dalam sistem kontradiksi sehingga melahirkan dialektika dan perubahan. Menurut Marx, konflik adalah kekuatan yang berjalan. Dalam kaitannya dengan konflik, Marx mempelajari classical ekonomi agar dapat membedakan dengan neoclassical ekonomi sehingga menemukan pengetahuan ekonomi baru. Dalam classical ekonomi dipelajari teori nilai lebih tenaga kerja; yaitu doktrin yang menyatakan sumber nilai adalah transformasi dari alam yang dilakukan tenaga kerja. Implikasinya pekerja dieksploitasi tenaganya dan tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Neoclassical ekonomi menghapus dampak radikal dengan mengeliminasi teori nilai lebih dengan kegunaan marginal; nilai tidak dapat didefinisikan sebagai suplai barang dan jasa tetapi permintaan relatif. Pandangan Marx tentang konflik tidak bisa dipisahkan dengan pandangannya tentang masyarakat yang lebih dikenal dengan Postulat Marx<sup>13</sup> sebagai berikut :

(1) Masyarakat terbagi menjadi dua kelas, yakni (i) Borjuis—kepentingan pemilik tanah dan kapital; (ii) Borjuis kecil—sebagai transisi dan (iii) Proletar—petani kecil; (2) Adanya kategori kelas tersebut menempatkan

---

<sup>13</sup> Muryanti, Damar Dwi Nugroho, dan Rokhiman, 2013, *Teori Konflik dan Konflik Agraria di Pedesaan*, (Bantul : Kreasi Wacana), 9-10

satu sisi dari antagonisme yang membawa isu dominan tentang pertentangan masyarakat dan tentang arah perkembangan masyarakat; (3) Pertentangan kelas bukan berasal dari perbedaan pendapat, atau dari perbedaan sumber pendapatan; (4) Kelas didasarkan atas hubungan produksi, yaitu pembagian kekayaan efektif yang memiliki hubungan tak terpisahkan dengan politik; (5) Proses pengelompokan ke dalam kelas sosial muncul dari kondisi sosial yang diawali dengan pembagian kekayaan pribadi; (6) Kelas sosial yang terbentuk ikut serta dalam pertentangan politik sebagai kelompok yang diorganisasikan; (7) Pertentangan kelas merupakan kekuatan yang menggerakkan perubahan sosial. Bagi Karl Marx, masyarakat bukan sebuah bentuk organisasi sosial yang statis. Ciri dominan masyarakat adalah perubahan struktur sosial secara terus-menerus. Pertentangan yang terjadi merupakan produk sistematis dari struktur masyarakat yang ada.

Selanjutnya, perspektif konflik menurut Weber didasarkan pada realitas yang menunjukkan fenomena yang terjadi di dunia sangatlah multidimensional. Menurut Weber konflik tidak hanya disebabkan oleh satu faktor diantara faktor yang lain, tetapi konflik muncul dari berbagai faktor yang multidimensi, pluralitas kelompok yang berbeda, kepentingan dan perspektif dalam membangun dunia. Weber tidak hanya menunjukkan banyak aspek saja, tetapi perjuangan dalam menuju dominasi dari masing-masing faktor, salah satunya dalam bidang ekonomi dan politik. Keduanya merupakan suatu bentuk perjuangan untuk mengisi

kepentingan politik diantara politikus dan kelas ekonomi. Teori konflik menurut Weber terkait dengan permasalahan kelas dan organisasi. Weber mengenalkan tiga dimensi stratifikasi yang dikenal dengan istilah kelas, status, dan partai. Ketiganya tersusun atas kelompok kepentingan yang saling berhubungan satu sama lain. Konflik kelas tidak hanya terjadi antara kapitalis dan pekerja, pemilik modal dan tenaga kerja saja tetapi perjuangan untuk mengontrol posisi terhadap pasar melalui uang dan kredit, tanah, berbagai peralatan industri dan berbagai skill tenaga kerja. Kelas dominan adalah pihak yang mampu mengatur untuk mendapatkan kekuatan monopoli pasar yang menguntungkan. Sebaliknya kelas yang didominasi hanya mendapatkan sedikit monopoli. Demikian halnya dengan statifikasi status dan politik.<sup>14</sup>

Adapun pemikiran Simmel tentang konflik mengkategorikan pihak-pihak yang terlibat sebagai yang mendominasi dan yang menaati. Hal ini sesuai dengan pemikirannya tentang bentuk-bentuk superordinasi dan sub-ordinasi (dominasi dan ketaatan). Dalam banyak hal superordinat memperhitungkan kebutuhan atau keinginan sub-ordinat, meskipun hanya bertujuan untuk mengontrol sub-ordinat. Dalam hal ini superordinat dipengaruhi oleh sub-ordinat. Perilaku sub-ordinat dan superordinat bukan merupakan manifestasi belaka dari karakteristik pribadi atau kemauan individu, tetapi mencerminkan tenggelamnya sebagian kepribadian dan pengaruh bentuk sosial. Hubungan yang terjadi antara superordinat dan

---

<sup>14</sup> *Ibid.* Hal 17-20

sub-ordinat dapat terganggu karena adanya kemungkinan untuk konflik sebagai bentuk dasar dari interaksi. Konflik bukan hanya sekadar lawan dari persatuan, melainkan sangat erat kaitannya dengan berbagai proses yang mempersatukan dalam kehidupan masyarakat. Konflik dan persatuan dapat dilihat sebagai interaksi yang timbal balik. Pendapat Simmel tentang teori konflik adalah kerja sama dan konflik diantara individu dan kelompok sosial tidak hanya bersifat sendiri-sendiri tetapi berhubungan erat. Konflik tidak dapat membagi manusia secara rapi menjadi beberapa kelompok dengan kepentingan yang berbeda, tetapi menyatukan masyarakat melalui persilangan konflik yang di dalamnya berdiri bersama dalam satu rasa yang saling berlawanan. Bentuk-bentuk konflik menurut Simmel ada dua; yaitu (1) bentuk duaan (dyad) dan (2) tigaan (triad).<sup>15</sup> Simmel juga menganalisa beberapa cara untuk mengakhiri konflik, yakni menghilangkan dasar-dasar konflik, kemenangan pihak yang satu dan kekalahan pihak yang lain, kompromi, perdamaian yang dilakukan melalui peran pihak ketiga yang bersifat netral.

Pemikiran-pemikiran awal mengenai teori Konflik tersebut kemudian lebih dikembangkan oleh beberapa ahli pemikir, salah satunya adalah Ralf Dahrendorf dan Lewis Coser. Pemikiran konflik menurut Coser tertuang dalam bukunya berjudul *The Function of Conflict* yang hampir sepaham dengan George Simmel bahwa konflik berfungsi positif ketika bisa dikelola dan diekspresikan sewajarnya. Coser membedakan konflik

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 12

menjadi dua tipe dasar konflik, yaitu : (1) Konflik realistik, yaitu sumber konflik konkret atau bersifat material; dan (2) Konflik nonrealistik, yaitu konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan persaingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan. Selain itu, Coser juga memberi perhatian pada konflik internal dan eksternal. Konflik eksternal mampu menciptakan dan memperkuat identitas kelompok melalui batasan-batasan diantara kelompok. Selanjutnya konflik eksternal akan menjadi proses refleksi kelompok, sehingga dapat meningkatkan partisipasi anggotanya. Sementara konflik internal merupakan konflik yang berada di dalam kelompok dan melibatkan anggota kelompok itu sendiri. Konflik internal sangat penting untuk stabilitas sosial di dalam struktur sosial.<sup>16</sup>

### **2.1.2 Teori Konflik menurut Ralf Dahrendorf**

Berbicara mengenai konflik, persepektif konflik yang dikembangkan Ralf dahrendorf hingga kini masih dianggap sebagai karya terbaik dalam memahami konflik jika dibandingkan dengan para pemikir tedahulu, seperti Karl Marx, Max Weber, dan George Simmel.<sup>17</sup> Dahrendorf melihat bahwa dalam konflik terdapat kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda dimana ada satu usaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingan yang sebesar-besarnya. Berbeda dengan

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hal 15-17

<sup>17</sup> Wahyudi, 2021, *Teori Konflik dan Penerapannya pada Ilmu-Ilmu Sosial*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press

pemikiran-pemikiran tentang teori konflik sebelumnya, teori Konflik menurut Ralf Dahrendorf hadir dengan memperlihatkan bahwa dalam konflik, kewenangan yang dimiliki seseorang dalam masyarakat akan berpengaruh banyak terhadap posisi seseorang dalam konflik untuk mendapatkan keinginannya. Ralf Dahrendorf menyatakan bahwa konflik merupakan suatu proses yang terbentuk karena adanya struktur dominan dimana masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan dipaksa untuk tunduk, dimana dalam hal kekuasaan ini Ralf Dahrendorf melihat konflik sebagai konteks kapitalistik atau mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.<sup>18</sup> Konflik kepentingan menjadi fakta yang tidak dapat dihindarkan dari mereka yang memiliki kekuasaan dan tidak memiliki kekuasaan. Kekuasaan dan wewenang merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan pada posisi bawah dalam struktur sosial. Perbedaan posisi tersebut mengakibatkan kepentingan dan tujuan antara posisi atas dan bawah berbeda, sehingga rentan terjadi konflik.

Kekuasaan yang dimaksud oleh Dahrendorf mengacu kepada kekuatan kontrol, yang kemudian membuat pihak yang memiliki kekuasaan untuk memberikan perintah dan mendapatkan keinginannya yang diperoleh dari pihak yang tidak memiliki kuasa. Kekuasaan yang dimaksud Dahrendorf dipengaruhi oleh pemikiran Max Weber yang mengatakan bahwa wewenang legal formal sebagai sumber kekuasaan

---

<sup>18</sup> Doyle P. Johnson, diterj. M.Z Lawang, 1990, *Teori Sosiologi Klasik Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama



masyarakat. Oleh karena kekuasaan selalu memisahkan dengan tegas antara penguasa dan yang dikuasai, di dalam masyarakat terdapat dua golongan yang selalu bertentangan, masing-masing dipersatukan oleh ikatan kepentingan nyata yang bertentangan secara substansial dan langsung.

Kekuasaan dan wewenang menjadi menjadi sumber dari adanya konflik kelas dalam masyarakat, walaupun hal ini juga sedikit banyak menentukan peran di masyarakat. Latar belakang dari terjadinya pertentangan dalam kelompok dilihat dalam peranan sosial yang didalamnya terdapat harapan, dominasi, dan penundukan. Sehingga, wewenang menjadi penting untuk menganalisa suatu konflik. Wewenang dimiliki secara sah oleh satu pihak untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pihak lain. Menurut Dahrendorf perbedaan distribusi otoritas merupakan awal terjadinya konflik.<sup>19</sup>

Wewenang dalam pandangan Dahredorf dapat dilihat sebagai :<sup>20</sup>

- Dalam wewenang relasi yang terjadi adalah selalu relasi antara super dan sub-ordinansi;
- Relasi antara super dan sub-ordinansi, selalu berputar pada harapan kelompok superordinasi yang mengontrol perilaku sub-ordinasi melalui permintaan dan perintah serta peringatan dan larangan;

---

<sup>19</sup> George Ritzer, J. Douglas, Goodman, 2014, *Teori Sosiologi*, Bantul : Kreasi Kencana.

<sup>20</sup> Novri Susan, 2009, *Pengantar Sosiologi Konflik*, Jakarta: Prenada Media Group.

- Harapan untuk mengordinasi (antar super ke sub) tertanam secara permanent dalam posisi sosial dan bukan pada karakter individual;
- Karena keberadaan fakta akan kekuasaan superordinasi, maka dalam masyarakat, secara alamiah superordinasi akan selalu melibatkan subjek perorangan untuk mengontrol dan spesifikasi dari ruang sosial (spheres) yang memungkinkan melakukan kontrol;
- Wewenang menjadi hubungan terlegitimasi, tanpa protes dengan perintah otoritatif dapat memberi sanksi, dimana sesungguhnya ini merupakan fungsi sebenarnya dari sistem legal untuk mendukung pemberlakuan wewenang dengan memiliki legitimasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari subordinasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa konflik selalu ada dalam struktur sosial. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik beragam, mulai dari pertentangan kelas sosial; antara pemilik modal dan pekerja, struktur kekuasaan; antara penguasa dan masyarakat, maupun permasalahan kelas dan organisasi.

Selanjutnya, menurut Dahrendorf pada awalnya masyarakat terdiri dari suatu struktur yang telah terlembaga dengan baik. Masyarakat telah membentuk sebuah tatanan sosial sebagai sebuah organisasi yang ditandai dengan adanya hubungan kekuasaan dengan perangkat perannya masing-masing. Dalam hubungan ini terdapat hubungan wewenang normative dimana posisi tertentu diakui dan mempunyai hak normative untuk menguasai pihak-pihak lain. Kemudian kekuasaan dan

kewenangan tersebut disebut oleh Dahrendof sebagai suatu pemicu yang sangat berpotensi memunculkan pertikaian dan pada akhirnya menjadi sumber utama munculnya konflik. Kemunculan konflik mendorong adanya perubahan pada pola-pola yang sebelumnya telah terlembaga.<sup>21</sup>

Pada sebuah tatanan sosial yang telah terlembaga tersebut terdapat dua tipe peranan dasar, yakni yang berkuasa (superordinasi) dan yang dikuasai (subordinasi). Dimana peranan yang berkuasa mempunyai kepentingan untuk mempertahankan keadaan dan yang dikuasai berkeinginan agar adanya perubahan dan berkepentngan untuk membagi kembali kekuasaan atau wewenang. Perbedaan kepentingan ini pada waktu tertentu akan terus meningkat sehingga terjadi polarisasi dalam tatanan masyarakat yang kemudian membentuk dua kelompok yang bertentangan. Masing-masing kelompok akan terus memperjuangkan kepentingannya. Sehingga konflik dikatakan sebagai sumber perubahan sosial pada sistem-sistem sosial.<sup>22</sup>

Dahrendof mengasumsikan konflik sebagai proses yang timbul dari kekuatann-kekuatan yang bertentangan dalam struktur sosial. Konflik tersebut didorong oleh berbagai kondisi structural dan keinginan satu pihak untuk menguasai dan mendapat keuntungan dari pihak lain, sehingga konflik yang terjadi terbentuk dalam kerangka kapitalisme. Dominasi kekuasaan oleh salah satu pihak menjadi sumber utama konflik. Terlebih ketika kekuasaan tersebut telah mendapat legitiimasi. Hubungan

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, dan Ratih Lestarini, 1988, *Fungsionalisme dan Teori Konflik*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 77-78

<sup>22</sup> *Ibid.* hal 78

antara pihak yang dominan dengan pihak yang dikuasi menyebabkan adanya oposisi kepentingan.<sup>23</sup> Sedikitnya terdapat Sembilan proposisi yang diajukan oleh Dahrendof sebagai berikut:<sup>24</sup>

- Semakin besar anggota kelompok menyadari kepentingan tujuan mereka, semakin mungkin konflik terjadi.
- Semakin besar kondisi praktik, sosial, dan politik pada organisasi dipertemukan, semakin besar intensitas konflik terjadi.
- Semakin besar distribusi pada otoritas dan rewards yang lain diasosiasikan satu dengan yang lainnya, semakin besar intensitas konflik.
- Semakin lemah mobilitas antara kelompok super dan sub-ordinan, semakin besar intensitas konflik.
- Semakin lemah kondisi praktik, sosial, dan politik pada organisasi dipertemukan, semakin keras konflik terjadi.
- Semakin besar perampasan pada penaklukan, distribusi, dan pergeseran manfaat atau keuntungan dari kelompok absolute ke relative, semakin besar kekerasan konflik terjadi.
- Semakin lemah kemampuan pada kelompok konflik untuk membangun perjanjian peraturan, semakin besar kekerasan konflik terjadi.
- Semakin besar intensitas konflik, semakin besar struktur berubah dan terjadi regenerasi pada organisasi.

---

<sup>23</sup> *Ibid.* hal 80

<sup>24</sup> *Ibid.* hal 80-81

- Semakin keras konflik terjadi, semakin besar tingkat perubahan pada struktur dan reorganisasi.

Konflik selalu terjadi dimana saja yang mana lingkungan sosial tersebut mengalami perubahan. Yang dimaksud konflik adalah terbangunnya hubungan-hubungan beberapa pihak dalam arena dan struktur sosial tertentu akibat adanya perbedaan kepentingan dan tujuan sebagai bentuk penerjemahan kebutuhan yang diperjuangkan secara individual maupun kolektif.<sup>25</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konflik terjadi karena adanya gesekan antara kepentingan-kepentingan yang berbeda.

Teori konflik Dahrendorf sangat tepat digunakan untuk melihat konflik antara korporasi yang memiliki kepentingan membangun proyek di daerah, dengan masyarakat, sebagai pihak yang dikenai imbas dari pembangunan tersebut. Masyarakat di Kec. Barru pada awalnya hidup dalam sebuah tatanan masyarakat yang sudah terorganisir dengan baik. mereka hidup dengan mempertahankan kearifan lokal dan bergantung pada alam. Mayoritas masyarakat mengandalkan alam sebagai lahan mata pencaharian. Sampai kemudian datanglah perusahaan Semen dengan beralasan mengantongi izin prinsip dari pemerintah. PT. Conch kemudian hendak mendirikan pabrik semen di beberapa titik di wilayah Kec. Barru. masyarakat kemudian beranggapan bahwa proyek ini tidak menghasilkan banyak kecuali kerusakan lingkungan serta kerugian akibat

---

<sup>25</sup> Novri Susan MA, 2009, *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Jakarta: Kencana. Hal. 48

pengalihfungsian lahan, wargapun melakukan perlawanan yang melahirkan konflik ini. Sehingga, pola konflik yang terbentuk merupakan konflik tidak setara atau tidak equal karena terdapat posisi dominan dari korporasi yang disokong oleh Pemerintah, atau dapat dikatakan bahwa dalam konflik pembangunan pabrik semen di Kab. Barru terdapat dominasi dari struktur kekuasaan sesuai dengan pemikiran Ralf Dahrendorf.

### **2.1.3 Dinamika Konflik**

Dalam pandangan Dahrendorf, tahap prakonflik adalah ketika mereka yang berada pada posisi subordinant menyadari ketertindasan yang terjadi, namun subordinant masih belum memiliki kepentingan untuk mengubah posisi itu dan pada tahap ini kepentingan-kepentingan yang ada masih bersifat laten atau semu dan masih berada pada level individu, walaupun kepentingan semu ini sudah tersebar pada mereka yang merasa ditindas sebagai kelompok subordinasi. Konflik pada tahap ini masih tersembunyi dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi, sehingga pada proses ini memungkinkan terjadinya ketegangan hubungan di antara beberapa pihak dan/atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain.

Selanjutnya, kepentingan-kepentingan semu ini menjadi kepentingan nyata ketika ada proses penyadaran yang dilakukan oleh beberapa orang yang terlebih dahulu mengerti kepentingan yang harus

diperjuangkan. Bermula dari kesadaran tersebut, subordinant mulai menciptakan kelompok yang benar-benar sadar pada kepentingan bersama dan perlu diperjuangkan. Pada fase inilah terjadi proses pembentukan kelompok terorganisasi atau kelompok kepentingan yang siap melakukan gerakan perlawanan terhadap posisi dominan. Hal ini kemudian memungkinkan tergeraknya para kelompok subordinant untuk mulai melakukan aksi demonstrasi atau melakukan aksi konfrontasi lainnya. Tingkat intensitas pertikaian atau kekerasan yang mungkin terjadi tergantung pada kedua belah pihak yang berkonflik. Dahrendorf memberi beberapa kondisi agar formasi kelompok yang awalnya memiliki kepentingan semu menjadi kepentingan nyata, yaitu pertama, dalam kelompok terdapat pemimpin yang berani dengan hubungan konflik, kedua, kelompok memiliki ideology konflik, ketiga, para anggota kelompok memiliki kebebasan untuk mengorganisasi konflik, keempat, memiliki anggota-anggota yang komitmen dan aktif berkomunikasi di antara sesama.

Fase konflik selanjutnya adalah ketika konflik pecah menjadi bentuk aksi-aksi yang dilakukan secara intens atau massal. Pada tahap ini komunikasi biasanya sulit terjalin hingga terputus yang kemudian memunculkan pertanyaan yang cenderung menuduh pihak lain. Bisa jadi salah satu pihak menang, atau kalah, atau bahkan keduanya mengalami kekalahan bersama.

Kemudian, resolusi dalam konflik antara kelompok-kelompok yang berkonflik adalah redistribusi kekuasaan yang pada akhirnya membentuk keteraturan sosial (social order) sebagai hasil dari penggunaan kekuasaan dan paksaan. Resolusi dalam konflik antara kelompok-kelompok yang bersinggungan tersebut adalah redistribusi kekuasaan, dimana pada tahap ini konflik menjadi sumber dari perubahan sistem sosial. Selanjutnya, sekelompok peran baru memegang kunci kekuasaan dan wewenang dan mengatur posisi lain dibawahnya. Redistribusi wewenang merupakan pelembagaan dari kelompok peranan baru yang mengatur versus peranan yang diatur, yaitu dalam kondisi khusus kontes perebutan kekuasaan akan kembali muncul dengan inisiatif kelompok kepentingan yang ada, dan dengan dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Sehingga, dapat dikatakan bahwa kenyataan sosial yang memunculkan konflik kekuasaan dalam bermacam-macam tipe kelompok merupakan siklus yang akan terus berulang dan tidak akan pernah berakhir. Masalah sebelumnya yang teratasi dengan distribusi kekuasaan membentuk pola baru yang tercipta dari adanya konflik, yang mencakup hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai, kemudian menimbulkan serangkaian peristiwa-peristiwa yang menyebabkan terjadinya perubahan pola-pola organisasi sosial yang berujung pada terciptanya suatu keteraturan sosial.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hal 82



## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Muh. Ichsan Rustiana dalam Skripsi berjudul *Konflik Sosial Pembangunan Pabrik Semen di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2019*. Penelitian ini berusaha melihat faktor yang melatar belakangi konflik pembangunan semen antara masyarakat dengan korporasi. Beberapa hal yang melatar belakangi konflik yang terjadi antara lain masyarakat yang pro terhadap pabrik semen yaitu mereka mendukung karena dengan adanya pabrik semen dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Tegaldowo. Sedangkan masyarakat yang kontra terhadap adanya pabrik semen yaitu mereka menolak karena khawatir akan terjadi kerusakan lingkungan dan berdampak buruk bagi hasil pertanian, (2) faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik sosial dilihat dari masyarakat yang pro yaitu faktor sosial-ekonomi dan faktor imbalan (uang). Sedangkan pada masyarakat yang kontra terhadap adanya pabrik semen yaitu faktor lingkungan alam dan faktor hukum.<sup>27</sup>

Penelitian selanjutnya, adalah skripsi Artha Silvia Nababan, Kushandajani, Turtiantoro berjudul *Resolusi Konflik Pertanahan di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2015*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini melihat peran salah satu aktor yaitu Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam mengatasi konflik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik pertanahan yang

---

<sup>27</sup> Muh. Ichsan Rustiana, 2019, *Konflik Sosial Pembangunan Pabrik Semen di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah*, Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

terjadi disebabkan oleh (1) masalah administrasi pertanahan di Kota Bandar Lampung yang belum terstruktur dengan baik; (2) distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata; (3) masalah legalitas kepemilikan tanah. Resolusi konflik dilakukan melalui proses mediasi antara pihak yang terlibat konflik yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sekaligus sebagai mediator konflik.<sup>28</sup>

Selanjutnya, penelitian oleh Intan Jati Suminar dengan judul penelitian *Dinamika Konflik Pembangunan Pabrik Gula (Studi pada Pembanguna Pabrik Gula Rejoso Manis Indo (RMI) di Desa Rejoso Kecamatan Bingangun Kabupaten Blitar)* pada tahun 2019. Dalam penelitian ini kemudian dijelaskan mengenai dinamika konflik yyang terjadi pada pembanganan pabrik gula serta keterlibatan akto-aktor dalam konflik. Konflik kemudian bermula ketika Pemeruntah yang memberikan ijin pembangunan kepada pihak pabrik, namun dalam proses pembangunan, masalah-masalah seperti praktik pembebasan lahan, penyerobotan jalan dan sungai-sungai kecil terjadi karena tidak addanya sosialisai kepada masyarakat, sehingga menyebbakan masyarakat melakukakan aksi protes dan pengajuan pencabutan izin usaha yang dimiliki pabrik gula tersebut. Penelitian ini kemduian berfokus pada analisa terjadinya konflk dan aktor-

---

<sup>28</sup> Artha Silvia Nababan, Kashandajani, Turtiantoro, 2015, *Peran Kantor Pertanahan Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Pertanahan Secara Mediasi di Kota Bandar Lampung*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerinntahan, FISIP, Universitas Dipanegoro

aktor yang terlibat dalam konflik serta menggambarkan proses penyelesaian konflik yang kemudian di mediasi oleh pemerintah.<sup>29</sup>

Penelitian yang relevan selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Avid Nurmeida, Purwoko, Budi Setiyono dengan judul penelitian *Konflik Corporate vs Society: Analisis terhadap Konflik dalam Kasus Pendirian Pabrik Semen di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa timbulnya konflik tersebut dilatarbelakangi adanya perbedaan pendapat antara kelompok pro dan kontra terhadap rencana pendirian pabrik semen di kawasan kars Sukolilo, sebagai salah satu kawasan yang diprioritaskan memiliki bahan baku semen yang berkualitas. Karena itulah investor tertarik untuk dapat mengeksploitasi tanah kars yang terkandung di dalam pegunungan Kendeng. Dalam konflik tersebut bukan hanya dipicu antarkelompok masyarakat dengan pemrakarsa proyek tetapi juga dengan Pemerintah Daerah Kab. Pati.<sup>30</sup>

Kemudian, penelitian dengan focus penelitian mengenai konflik pembangunan selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Randy Rily Juniarto dengan judul penelitian *Dinamika Konflik Pembangunan Pabrik PT. Semen Indonesia (Studi Kasus di Rembang, Jawa Tengah)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik ini dilatarbelakangi oleh

---

<sup>29</sup> Intan Jati Suminar, 2019, *Dinamika Konflik Pembangunan Pabrik Gula (Studi pada Pembanguna Pabrik Gula Rejoso Manis Indo (RMI) di Desa Rejoso Kecamatan Bingangun Kabuupaten Blitar)*, Skripsi, Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Brawijaya Malang.

<sup>30</sup> Avid Nurmeida, Purwoko, Budi Setiyono, 2013, *Konflik Corporate vs Society: Analisis terhadap Konflik dalam Kasus Pendirian Pabrik Semen di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*, Jurnal, Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro.

kepentingan masing-masing pihak untuk mempertahankan dimensi ekonomi. Dalam pembangunan pabrik semen di Rembang masyarakat menolak pembangunan pabrik semen tersebut karena memiliki dampak negatif yang ditimbulkan. (1) Dari segi lingkungan Kawasan Pegunungan Kendeng mempunyai Cekungan Air Tanah (CAT), sehingga hal tersebut menjadikan Pegunungan Kendeng sebagai sumber kehidupan bagi warga sekitar. Dengan kehadiran PT Semen Indonesia, dikhawatirkan akan mengeruk habis air yang ada akibat dari penambangan yang dilakukan. Selain itu penambangan dapat mengakibatkan polusi suara maupun udara. Udara yang mengandung debu mengakibatkan penyakit baik manusia maupun tumbuhan. (2) Dari segi Ekonomi, mayoritas pekerja warga yang tinggal disekitar Pegunungan Kendeng adalah petani, sehingga air merupakan hal yang sangat penting. Selain itu penambangan yang dilakukan akan membutuhkan penggunaan lahan yang banyak, sehingga lahan pertanian warga nantinya akan sebagian tergerus proyek penambangan. (3) Adanya perubahan pola hubungan antara masyarakat yang pro dan yang kontra, yang menyebabkan renggangnya hubungan kekeluargaan antar masyarakat.<sup>31</sup>

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan diatas, dapat dilihat terdapat kesamaan dengan penelitian ini yaitu pada pembahasan konflik sebagai tema utama penelitian. Namun, yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitin selanjutnya adalah

---

<sup>31</sup> Randy Rily Juniarto, 2018, *Dinamika Konflik Pembangunan Pabrik PT. Semen Indonesia (Studi Kasus di Rembang, Jawa Tengah)*, Jurnal, Government Affairs and Administration, Jusuf Kalla School of Government.

lokasi penelitian, sehingga bentuk konflik yang terjadi juga akan berbeda, selain itu walaupun konflik yang terjadi pada penelitian-penelitian sebelumnya didasari oleh latar belakang permasalahan yang sama, namun dalam penelitian ini akan melihat bagaimana proses konflik itu terjadi, dimana hasil sementara dari dinamika konflik pada penelitian ini menunjukkan upaya masyarakat yang kemudian menunjukkan hasil pada diberhentikannya pembangunan pabrik secara sementara, sehingga dari hal tersebut dapat dilihat sebagai perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Pembangunan yang dilakukan PT. Conch Cement Indonesia di Kab. Barru sejak awal telah banyak menimbulkan protes dari masyarakat, namun dengan mengandalkan izin prinsip dari Pemkab Barru serta izin dari Kementrian, pembangunan kemudian tetap bisa dilanjutkan. Aturan yang telah dibuat kemudian menunjukkan dominasi dalam pelaksanaan pembangunan sehingga menimbulkan konflik.

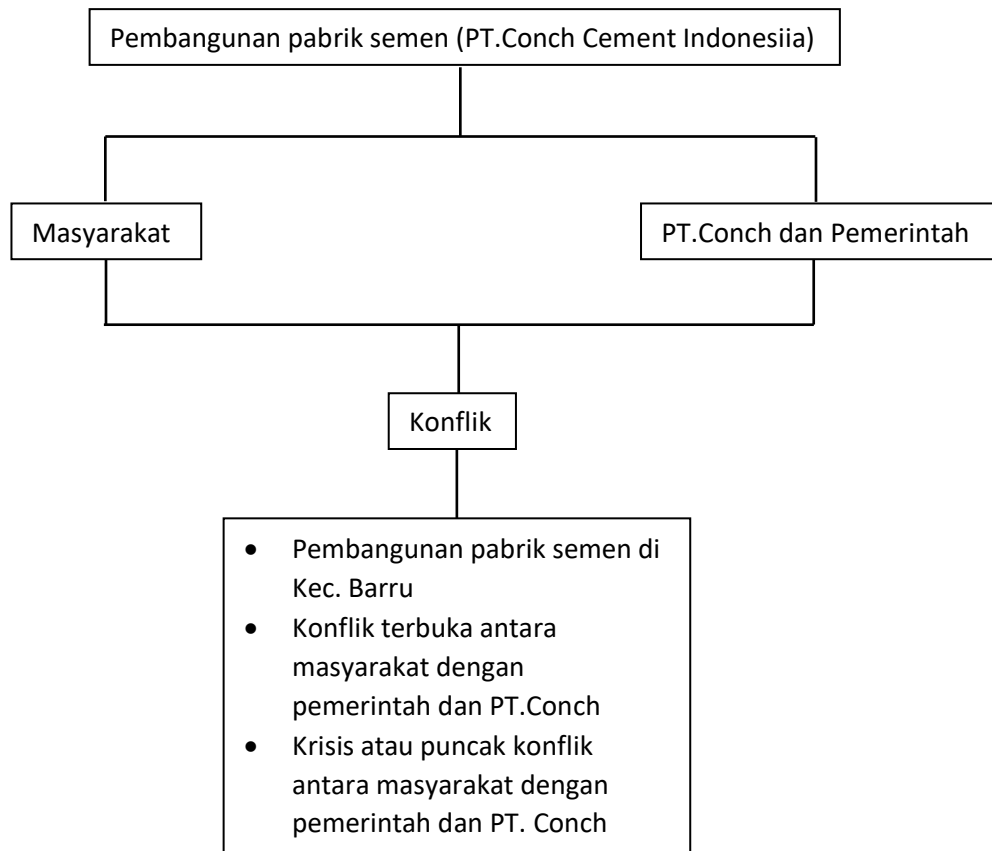
Harus diakui bahwa dalam kehidupan di masyarakat, konflik merupakan suatu bagian yang tidak dipisahkan dari konsistensi kehidupan itu sendiri. Hal ini terjadi karena dalam bermasyarakat pergesekan-pergesekan dan keterhubungan akan terus terjadi. Keterhubungan atau pergesekan yang terjadi antara masyarakat Kab. Barru dengan PT. Conch Cement Indonesia adalah ketika terdapat perbedaan interpretasi akan

lahan pada pembangunan pabrik semen yang secara posisi cukup berdampingan dengan pemukiman warga.

Perbedaan kepentingan serta interpretasi antara kedua belah pihak menyebabkan munculnya konflik. Proses konflik yang terjadi kemudian dilihat ketika pembangunan pabrik semen mulai dilakukan. Hal ini memicu konflik karena lokasi pembangunan yang berada di tengah koyta sehingga menyebabkan kekhawatira-kekhawatiran akan dampak lingkungan. Selanjutnya, konflik yang terjadi mulai dalam tahap terbuka, yaitu ketika masyarakat mulai melakukan konfrontasi dan menunjukkan protes terhadap persoalan yang ada. Selanjutnya, krisis atau puncak konflik terjadi ketika masyarakat mengambil jalur hukum atas permasalahan ini untuk menuntut pemerintah dan PT.Conch.

Berikut ini merupakan gambaran dari kerangka pemikiran yang akan dilakukan dalam penelitian ini :

## 2.1 Gambar bagan kerangka pemikiran



## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

Pada bagian ini memaparkan metode penelitian yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian. Hal yang mendasar yang terdapat dalam bagian ini diantaranya lokasi penelitian, tipe dasar penelitian, jenis data teknik pengumpulan data, serta teknik analisi data yang digunakan peneliti dan untuk pengolahan data yang telah didapatkan di lapangan menjadi data yang lebih rinci, serta jelas sehingga tujuan penelitian dapat tergambarkan dengan jelas.

#### **3.1 Pendekatan dan Metode penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif bernaung di bawah kutub paradigma interpretivisme, subyektivisme, dan definisi sosial<sup>32</sup>. Penelitian kualitatif memiliki dasar yang bersifat deskriptif analitis dalam pengumpulan data untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif juga bersifat induktif yang berangkat dari fenomena/data yang ada, menggunakan landasan konsep/teori yang sudah ada sebagai pedoman atau bahan panduan serta penjelas untuk memfokuskan penelitian, berfokus pada makna yang terdapat dalam suatu fenomena yang diteliti serta mengutamakan akan pentingnya proses

---

<sup>32</sup> Burhan Bungin, 2015, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 14.